

RENCANA KERJA RENJA

2025



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

Jl. Raya Cibenda No.68 Cibenda Parigi Pangandaran Kode Pos 46393
Telp/Fax. (0265) 7500646 Email: dispusip.pnd@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Raya Cijulang Dusun Ciheras Desa Sukaresik Kec. Sidamulih Kabupaten Pangandaran 46365
Fax. (0265) 7500646 Email : dispusip.pnd@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor :Kpts. 343/PR.04.02/DISPUSIP/2024

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025;
- b. bahwa Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandara Tahun 2018, Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, dan masalah yang dihadapi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran tentang Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
 44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
 45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
 46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
 47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40);
 48. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
 49. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 50. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Dispusip adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007

- tentang Perpustakaan dan Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
 3. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022-2026, yang selanjutnya disebut Renstra Dispusip adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.
 4. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Dispusip adalah dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II SISTEMATIKA RENJA Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu - isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Lampiran

BAB III
ISI DAN URAIAN RENJA
Pasal 3

Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dispusip Tahun 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Ditetapkan di : Sidamulih
Pada tanggal : 23 Juli 2024

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PANGANDARAN



DODI DJUBARDI, S.Pd.
NIP. 19680404 199508 1 001

Tembusan

Kepada Yth. :
1. Inspektorat Kabupaten Pangandaran;
2. Kepala Bagian Ortala Setda Kabupaten Pangandaran;
3. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran telah terbentuk sesuai Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, tata Kerja dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran, Pagu Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Kami menyadari, Renja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap dengan Renja ini semua program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh semua elemen. Renja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Parigi, 17 Juli 2024

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PANGANDARAN



DODI DJUBARDI, S.Pd.
NIP. 19680404 199508 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.3.1. Maksud	8
1.3.2. Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ..	19
2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	35
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran	37
3.1. Program dan Kegiatan	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	49
BAB V PENUTUP	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang terdiri dari setiap SKPD yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun dokumen awal dalam rencana kerja yang dipersiapkan adalah adanya rancangan awal dari RKPD, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Bahkan telah ditetapkan pula di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh serta harus tanggap terhadap adanya perubahan-perubahan dalam jenjang perencanaan.

Renja SKPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2026 serta pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran tahun 2025 sekaligus sebagai pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2026 dari urusan perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana kerja Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran menjabarkan tujuan dan sasaran serta arah pengembangan perpustakaan dan kearsipan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan. Oleh karena itu substansi penyusunan RKPD Tahun 2025 harus selaras dengan dokumen perencanaan baik di tingkat Pusat, dokumen perencanaan di tingkat Provinsi dan tidak terlepas memperhatikan pula dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten di Pangandaran sehingga akan terjadi sinergitas perencanaan pembangunan Nasional, Propinsi dan Kabupaten.

RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Disamping itu RKPD penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2022-2026 dengan mengacu pada RKPD Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025, sehingga kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pangandaran adalah menjembatani antara perencanaan strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan maupun program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga dapat dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahunan, karena dalam pelaksanaan pembangunan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah. Dalam keterkaitan antara RPJPD dengan RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran, dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program maupun kegiatan yang ada.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

Dasar Hukum Penyusunan Penetapan Renja PD Tahun 2025:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

31. Peraturan Menteri Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40);
48. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
49. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
50. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk operasional jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku, rancangan Rencana Kerja SKPD digunakan untuk penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pangandaran, RKPD Kabupaten selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan rencana sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat terjaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang 23 Tahun 2014. Disamping itu selain yang disebutkan diatas tujuan lain yang hendak dicapai adalah:

- a. Memberikan gambaran kemampuan SKPD dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan introspeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/pimpinan instansi.
- b. Sebagai acuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran dalam mengoperasionalkan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- c. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas pengertian tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen SKPD, Renstra SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan

2.3 Isu - isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai perkembangan tingkat kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan hasil telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan uraian program dan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun rencana yang dilengkapi dengan lokasi dan indikasi pendanaan yang dibutuhkan berdasarkan sumber dana APBD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan tentang isi rencana kerja berupa program dan kegiatan di Perangkat Daerah berikut sumber pendanaannya.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran, Maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Untuk tahun anggaran 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan 5 program, 19 kegiatan dan 50 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran setelah Perubahan Penjabaran ke-5 adalah sebesar Rp. 5.463.476.877,00,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.866.068.288,00,- atau 34,16% dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.463.476.877	1.866.068.288	34,16%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.215.810.105	1.847.918.291	35,43%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.432.527.760	1.528.842.698	44,54%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.655.280	20.785.347	34,16%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.331.400	19.071.597	47,29%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.323.880	1.713.750	51,56%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.516.626.598	1.120.259.962	44,51%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.474.364.438	1.098.830.865	44,41%
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.806.280	17.902.597	50,00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.526.560	3.526.500	100,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.929.320	-	0,00%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37.933.920	17.859.597	47,08%
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	37.933.920	17.859.597	47,08%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.325.840	7.144.798	41,24%
8	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	17.325.840	7.144.798	41,24%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.887.254	72.679.050	39,74%
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.515.103	757.500	21,55%
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.743.111	26.000.300	53,34%
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.197.940	3.415.250	47,45%
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.679.600	1.371.000	17,85%
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.751.500	41.135.000	35,54%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0,00%
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0,00%
15	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	426.999.852	214.724.944	50,29%
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	600.000	54,55%
17	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	197.999.205	120.137.965	60,68%
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	227.900.647	93.986.979	41,24%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.099.016	75.389.000	36,40%
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163.349.016	48.139.000	29,47%
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.750.000	27.250.000	62,29%

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.725.177.714	311.209.795	18,04%
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.440.755.967	220.195.194	15,28%
21	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	105.046.300	17.820.597	16,96%
22	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	197.013.174	139.349.010	70,73%
23	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.970.160	-	0,00%
24	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	19.114.904	5.665.798	29,64%
25	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	18.809.432	5.665.798	30,12%
26	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.216.196	800.000	8,68%
27	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	48.318.000	22.470.798	46,51%
28	Pengembangan Bahan Pustaka	928.478.821	5.760.000	0,62%
29	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	71.893.596	16.997.395	23,64%
30	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.895.384	5.665.798	28,48%
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	284.421.747	91.014.601	32,00%
31	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	56.259.557	12.731.597	22,63%
32	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	56.236.114	39.039.668	69,42%
33	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	72.340.370	0	0,00%
34	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	57991570	0	0,00%
35	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41594136	39243336	94,35%
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	58.104.631	7.865.798	13,54%
	Pelestarian Naskah kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	41.776.122	7.065.798	16,91%
36	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	24.282.622	-	0,00%
37	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	17.493.500	7.065.798	40,39%
	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.328.509	800.000	4,90%
38	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	9.025.964	800.000	8,86%
39	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	7.302.545	-	0,00%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	247.666.772	18.149.997	7,33%
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	206.656.728	18.149.997	8,78%
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	160.773.008	18.149.997	11,29%
40	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	39.229.868	16.399.997	41,80%
41	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	121.543.140	1.750.000	1,44%
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0,00%
42	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	0	0	0,00%
43	Akuisisi. Pengolahan. Preservasi. dan Akses Arsip Statis	0	0	0,00%
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	45.883.720	0	0,00%
44	Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	0	0	0,00%
45	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	45.883.720	-	0,00%
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	41.010.044	0	0,00%
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	41.010.044	0	0,00%
46	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	41.010.044	-	0,00%
47	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi Arsip di Bawah 10 Tahun	0	0	0,00%

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	0	0	0,00%
48	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	0	0	0,00%
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	0	0	0,00%
49	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	0	0	0,00%
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	0	0	0,00%
50	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai persyaratan Penjaminan keabsahan Arsip	0	0	0,00%

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pangandaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN											
	URUSAN PERPUSTAKAAN											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	95	%	90	%	91	79,1	86,92%	92	79,1	83,26%
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2 Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3 Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	85	%	61,69	%	60	39,76	66,27%	70	39,76	46,78%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10	Dokumen	4	Dokumen	2	2	100,00%	2	8	80,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	2	Laporan	1	1	100,00%	2	5	100,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	85	%	52,78	%	55	53,33	96,96%	70	53,33	62,74%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1204	Orang/Bulan	448	Orang/Bulan	238	224	94,12%	350	1022	84,88%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	Dokumen	24	Dokumen	12	12	100,00%	3	39	65,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	2	Laporan	1	1	100,00%	1	4	80,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Laporan	2	Laporan	1	1	100,00%	2	5	100,00%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	45	Jenis	41	Jenis	42	37	88,10%	44	41	91,11%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Laporan	24	Laporan	12	12	100,00%	12	48	80,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	85	%	80	%	82	80	97,56%	84	80	94,12%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	60	Dokumen	24	Dokumen	12	12	100,00%	1	37	61,67%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	85	%	80	%	82	61	74,39%	83	80	94,12%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	30	Paket	28	Paket	25	14	56,00%	25	28	93,33%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	55	Paket	35	Paket	35	33	94,29%	35	35	63,64%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	2	2	100,00%	2	2	100,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	180	Dokumen	72	Dokumen	36	18	50,00%	18	108	60,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325	Laporan	54	Laporan	60	15	25,00%	24	93	28,62%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	85	%	50	%	70	0	0,00%	90	50	58,82%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	90	Unit	0	Unit	17	0	0,00%	8	8	8,89%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	5	Unit	1	Unit	1	0	0,00%	0	1	20,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	85	%	53,52941	%	70	77,59889	110,86%	80	77,59889	91,29%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	Laporan	200	Laporan	110	80	72,73%	150	430	86,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	300	Laporan	120	Laporan	60	36	60,00%	3	159	53,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	657	Laporan	360	Laporan	180	180	100,00%	13	553	84,17%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	85	%	35,20833	%	70	51,58	73,69%	80	51,58	60,68%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	Unit	4	Unit	7	6	85,71%	7	6	85,71%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	Unit	28	Unit	25	17	68,00%	30	28	70,00%
	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	20,24	Indeks	18,18	Indeks	19,16	19,28	100,63%	19,61	19,28	95,26%
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aspek pembangunan literasi masyarakat	7	Aspek	7	Aspek	7	7	100,00%	7	7	100,00%
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	5	Layanan	5	Layanan	5	5	100,00%	11	5	100,00%
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2	Perpustakaan	1	Perpustakaan	2	2	100,00%	1	2	100,00%
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi bahan pustaka khas daerah	50	Bahan Pustaka	20	Bahan Pustaka	11	0	0,00%	12	32	64,00%
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	60	Perpustakaan	3	Perpustakaan	14	11	78,57%	16	30	50,00%
	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50	Perpustakaan	10	Perpustakaan	15	15	100,00%	6	31	62,00%
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola perpustakaan yang mengikuti BIMTEK	556	Orang	0	Orang	102	51	50,00%	2	53	9,53%
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	10	Layanan	2	Layanan	2	2	100,00%	2	6	60,00%
	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	2100	Eksemplar	1816	Eksemplar	330	0	0,00%	320	2136	101,71%
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2100	Eksemplar	1816	Eksemplar	330	0	0,00%	320	2136	101,71%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0	Dokumen	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Budaya Gemar Membaca	16,16	Nilai	14,09	Nilai	14,76	10,9	73,85%	15,77	10,9	67,45%
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	70	Lokus	35	Lokus	55	55	100,00%	60	55	78,57%
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4	Perpustakaan	2	Perpustakaan	1	1	100,00%	1	4	100,00%
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	30	Orang	6	Orang	16	16	100,00%	16	38	126,67%
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	69	Perpustakaan	0	Perpustakaan	12	0	0,00%	14	14	20,29%
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	500	Orang	100	Orang	110	100	90,91%	120	320	64,00%
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Peningkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan	10	%	0	%	10	10	100,00%	10	10	100,00%
	Pelestarian Naskah kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang didigitalisasi/Alih aksarakan	1	Dokumen	0	Dokumen	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	60	Orang	0	Orang	10	10	100,00%	10	20	33,33%
	Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	6	Eksemplar	0	Eksemplar	1	1	100,00%	1	2	33,33%
	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan seleksi budaya etnis nusantara	2	Kegiatan	0	Kegiatan	2	2	100,00%	2	2	100,00%
	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	6	Eksemplar	0	Eksemplar	1	1	100,00%	1	2	33,33%
	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	6	Eksemplar	0	Eksemplar	1	1	100,00%	1	2	33,33%
	URUSAN KEARSIPAN											
	Program Pengelolaan Arsip	Nilai LAKE Kabupaten/Kota	4180	Nilai	3930	Nilai	3019	1032	34,18%	3353	3930	94,02%
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD taat perundang-undangan	24	SKPD	24	SKPD	24	24	100,00%	24	24	100,00%
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah SKPD yang Tertib Instumen Kearsipan	24	SKPD	24	SKPD	24	24	100,00%	24	24	100,00%
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Perda Penyelenggaraan Kearsipan	6	Perda	0	Perda	1	0	0,00%	1	1	16,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Dikelola	150	Dokumen	0	Dokumen	90	0	0,00%	125	125	83,33%
	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Naskah yang ditelusuri	78	Naskah	0	Naskah	13	0	0,00%	1	1	1,28%
	Akuisisi Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang di Perservasi	100	Dokumen	0	Dokumen	20	0	0,00%	10	10	10,00%
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan simpul jaringan informasi	1	Jaringan	1	Jaringan	1	0	0,00%	1	1	100,00%
	Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Informasi Kearsipan melalui JIKN	1	Pengguna	1	Pengguna	1	0	0,00%	1	1	100,00%
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan di SKPD	100	Orang	63	Orang	100	0	0,00%	26	89	89,00%
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase LAKE Kabupaten/Kota	100	%	0	%	72,23	0	0,00%	80,22	80,22	80,22%
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah dokumen Penyusutan Arsip Inaktif	24	Dokumen	0	Dokumen	60	0	0,00%	80	80	333,33%
	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah dokumen arsip yang di musnahkan	24	Dokumen	0	Dokumen	4	0	0,00%	2	2	8,33%
	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi Arsip di Bawah 10 Tahun	Jumlah Dokumen arsip yang di nilai dan di tetapkan	8	Dokumen	0	Dokumen	4	0	0,00%	2	2	25,00%
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kearsipan yang teridentifikasi dan terselamatkan	400	Dokumen	0	Dokumen	60	0	0,00%	80	80	20,00%
	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Terselamatkan	60	Dokumen	0	Dokumen	10	0	0,00%	1	1	1,67%
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	2	Dokumen	0	Dokumen	2	0	0,00%	2	2	100,00%
	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Pemekaran Desa	6	Dokumen	0	Dokumen	1	0	0,00%	1	1	16,67%
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang di Alih Mediakan melalui Autentikasi	78	Naskah	0	Naskah	13	0	0,00%	13	13	16,67%
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai persyaratan Penjaminan keabsahan Arsip	Jumlah Arsip Statis yang dialihmediakan melalui autentifikasi	78	Naskah	0	Naskah	13	0	0,00%	13	13	16,67%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran dan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, tata Kerja dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran serta Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Selanjutnya untuk analisis kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2025 sebagai berikut:

Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pangandaran

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK		Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4		-5	-6	-7	-8	-9	-11	-12	-13	-14	-15	-16
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	20,24	Indeks	18,56	19,16	19,61	19,95	20,24	18,18	19,28	19,61	19,95	20,24	
2	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun (Orang)	-	39960	Orang	16560	16560	27720	33840	39960	15278	15900	27,72	33,84	39960	
3	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah (Eksemplar)	-	13713	Eksemplar	11211	11628	12184	12879	13713	23036	25031	12,184	12,879	13713	
4	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai (Orang)	-	467	Orang	306	346	386	427	467	264	695	386	427	467	
5	Jumlah masyarakat terlibat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi per tahun (Orang)	-	12578	Orang	7178	8078	9278	10778	12578	6473	11263	9,278	10,778	12578	
6	Jumlah Total Perpustakaan (Perpustakaan)	-	654	Perpustakaan	637	642	648	654	654	695	695	648	654	654	
7	Jumlah Perpustakaan yang telah memiliki SNP di suatu wilayah (Perpustakaan)	-	348	Perpustakaan	228	258	288	318	348	275	402	288	318	348	
8	Jumlah Anggota Perpustakaan (Orang)	-	5873	Orang	3573	3993	4533	5193	5873	6888	8082	4,533	5,193	5873	
9	Persentase peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno	-	1	Naskah	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	
10	Nilai LAKE Kabupaten/Kota	-	4.180	Nilai	2.764	3.019	3.353	3.732	4.180	3930	1032	3.353	3.732	4.180	
11	Kebijakan Kearsipan (%)	-	5,734	%	5,734	5,734	5,734	5,734	5,734	0	0	5,734	5,734	5,734	
12	Pembinaan Kearsipan (%)		13,166	%	13,166	13,166	13,166	13,166	13,166	0	0	13,166	13,166	13,166	
13	Pengolahan Arsip Inaktif Dengan Retensi Sekurang-Kurangnya 10 Tahun (%)	-	4	%	4	4	4	4	4	0	0	4	4	4	
14	Pengelolaan Arsip Statis (%)	-	14,88	%	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	
15	Sdm Kearsipan (%)	-	13,74	%	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	3	3	13,74	13,74	13,74	
16	Persentase LAKE Kabupaten/Kota	-	100	%	66,13	72,23	80,22	89,29	100	142	34,18	80,22	89,29	100	

2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

a. Kondisi Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan saat ini.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas–tugas operasional Perpustakaan dan pengelolaan Arsip diperlukan langkah-langkah terobosan untuk mewujudkan

manajemen pengelolaan arsip dan Perpustakaan dengan tertib, efisien dan efektif dengan mengembangkan jaringan kerja utamanya dengan SKPD terkait yang pernah melaksanakan tugas-tugas kearsipan dan perpustakaan.

Dengan melihat gambaran umum di atas serta memperhatikan kondisi yang berkembang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran saat ini, maka dapat digambarkan kondisi internal organisasi dan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat capaian tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sebagai berikut :

1. Kondisi Internal Organisasi

1.1. Kekuatan (*Strength*)

- Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- Adanya personil untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi yaitu : 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (Tiga) orang Kepala Bidang, 1 (satu) orang Sub Bagian Umum, 1 (satu) orang Bendahara, 8 (Delapan) orang Jabatan Fungsional dan 36 (tiga puluh enam) staf Non PNS.
- Suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif.
- Terjalannya sistem koordinasi antar seluruh komponen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten pangandaran serta lintas SKPD yang harmonis.

2.1. Kekurangan (*Limited*)

- Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM utamanya personil yang mempunyai kualifikasi kearsipan, Perpustakaan dan IT.
- Belum optimalnya sistem pengelolaan perpustakaan dan Kearsipan.
- Belum tersedia depo arsip dan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Pangandaran yang memenuhi syarat sesuai standar.
- Kurangnya Fasilitas yang dapat menjangkau masyarakat untuk pelayanan perpustakaan.
- Kurangnya Bahan Pustaka.

2. Kondisi Eksternal Organisasi

2.1. Peluang (*Opportunity*)

- Adanya komitmen Pimpinan Daerah untuk membentuk Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan.
- Berkembangnya teknologi digital.
- Adanya daerah lain yang sudah melaksanakan pengelolaan arsip secara modern.
- Adanya Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang ditindak-lanjuti dengan PP Nomor 24 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang ditindak-lanjuti dengan PP Nomor 28 Tahun 2012.

- Berbagai Daerah sudah melaksanakan pelayanan perpustakaan berbasis IT.

2.2. Ancaman (*threatment*)

- Kemungkinan adanya intervensi dari berbagai kelompok kepentingan akan dapat mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.
- Kemungkinan terjadinya musibah baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun akibat ulah manusia merupakan ancaman terjadinya kerusakan dan hilangnya arsip dan barang daerah.
- Masih banyak Aparatur maupun SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang kurang paham akan arti penting pengelolaan arsip secara tertib.
- Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya membaca.

b. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi Masa Depan

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Perpustakaan dan Pengelola Arsip Kabupaten Pangandaran tidak bisa terlepas dari kondisi saat ini. Kedepan, Perpustakaan dan Kearsipan daerah akan terus tumbuh dan berkembang secara akumulatif seiring dengan semakin meningkatnya volume dan kompleksitas Tugas dan fungsi Organisasi. Untuk itu dengan semakin meningkatnya volume arsip dan Buku Perpustakaan memerlukan pengelolaan yang tepat, sehingga dapat tercipta efektifitas, efisiensi, produktifitas dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut diperlukan:

- a. Keseragaman, kontinuitas dan keterpaduan dalam pelaksanaan pengelolaan arsip dan barang daerah mulai dari tahap pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sampai dengan tahap penghapusan arsip dan barang daerah.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional dalam bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- c. Sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi standart mutu.
- d. Pembinaan dan pelatihan yang terus menerus sehingga terpenuhi tenaga pengelola Perpustakaan dan Kearsipan yang memadai. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan komitmen, program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan terciptanya berbagai jenis perpustakaan yang sesuai standart.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran utamanya dalam melaksanakan

pelayanan SKPD mengalami hambatan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Minimnya sarana prasarana di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. Minimnya sarana prasarana Perpustakaan dan Kearsipan
3. Terbatasnya sumber daya manusia terutama jumlah fungsional umum
4. Alokasi anggaran yang kurang proporsional menyebabkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang ada menjadi kurang optimal dalam mencapai indikator kinerja yang diharapkan
5. Tidak ada petugas Pengelola Arsiparis dan Pustakawan
6. Kurangnya Fasilitas Buku
7. Kurangnya pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling
8. Belum adanya sistem pengelola arsip

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 adalah tahapan pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2022-2026 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas-bawah serta bawah-atas (top down-bottom up).

Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itulah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Pangandaran bisa dilihat pada lampiran.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran

NO	KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALIS KEBUTUHAN			
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			14.396.053.967,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			14.396.053.967,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.396.053.967,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.396.053.967,00
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			4.307.251.053,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			4.307.251.053,00
1,	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase peningkatan kompetensi aparatur	90% 93% 95%	3.246.053.967,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase peningkatan kompetensi aparatur	90% 93% 95%	3.246.053.967,00
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	70%	2.278.774.137,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	70%	2.278.774.137,00
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	2.278.774.137,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	2.278.774.137,00
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	84%	63.429.360,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	84%	63.429.360,00
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	2.706.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	2.706.000,00
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	44.942.773,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	44.942.773,00
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.780.587,00		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.780.587,00
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	80%	883.838.470,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	80%	883.838.470,00
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	229.800.070,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	229.800.070,00
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	204 Laporan	654.038.400,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	204 Laporan	654.038.400,00
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	80%	20.012.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	80%	20.012.000,00
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	20.012.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	20.012.000,00
2,	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	19,95 Indeks	1.023.261.919,00	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	19,95 Indeks	1.023.261.919,00
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aspek pembangunan literasi masyarakat	7 Aspek	916.276.600,00	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aspek pembangunan literasi masyarakat	7 Aspek	916.276.600,00
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan	18 Perpustakaan	19.099.400,00		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan	18 Perpustakaan	19.099.400,00

NO	KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALIS KEBUTUHAN			
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2 Perpustakaan	750.114.300,00		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2 Perpustakaan	750.114.300,00
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota				Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota			
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	2 Layanan	25.318.000,00		Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	2 Layanan	25.318.000,00
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota				Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota			
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	7 Perpustakaan	17.235.000,00		Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	7 Perpustakaan	17.235.000,00
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120 Orang	12.000.000,00		Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120 Orang	12.000.000,00
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan				Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan			
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	19.102.300,00		Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	19.102.300,00
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan			
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	390 Eksemplar	21.348.000,00		Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	390 Eksemplar	21.348.000,00
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota			
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	13 Eksemplar	21.326.300,00		Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	13 Eksemplar	21.326.300,00
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	5 Perpustakaan	30.733.300,00		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	5 Perpustakaan	30.733.300,00
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Budaya Gemar Membaca	15,77 Nilai	106.985.319,00	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Budaya Gemar Membaca	15,77 Nilai	106.985.319,00
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	130 Orang	20.000.000,00		Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	130 Orang	20.000.000,00
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	16 Perpustakaan	12.000.000,00		Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	16 Perpustakaan	12.000.000,00
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	19.865.909,00		Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	19.865.909,00
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	26 Orang	24.251.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	26 Orang	24.251.000,00
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat			
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	65 Lokus	30.868.410,00		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	65 Lokus	30.868.410,00

NO	KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALIS KEBUTUHAN			
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	<i>Persentase Peningkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan</i>	10%	37.935.167,00	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	<i>Persentase Peningkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan</i>	10%	37.935.167,00
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Naskah Kuno yang didigitalisasi/Alih aksarakan</i>	1 Dokumen	23.185.622,00	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Naskah Kuno yang didigitalisasi/Alih aksarakan</i>	1 Dokumen	23.185.622,00
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			
			<i>Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno</i>	10 Orang	8.830.622,00		<i>Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno</i>	10 Orang	8.830.622,00
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			
			<i>Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan</i>	1 Eksemplar	14.355.000,00		<i>Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan</i>	1 Eksemplar	14.355.000,00
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kegiatan seleksi budaya etnis nusantara</i>	2 Kegiatan	14.749.545,00	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kegiatan seleksi budaya etnis nusantara</i>	2 Kegiatan	14.749.545,00
	2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			
			<i>Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota</i>	1 Eksemplar	9.992.000,00		<i>Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota</i>	1 Eksemplar	9.992.000,00
	2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			
			<i>Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota</i>	1 Eksemplar	4.757.545,00		<i>Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota</i>	1 Eksemplar	4.757.545,00
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			10.088.802.914,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			266.535.711,00
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	<i>Nilai LAKE Kabupaten/Kota</i>	(A) 3732 Nilai	10.050.614.955,00	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	<i>Nilai LAKE Kabupaten/Kota</i>	(A) 3732 Nilai	10.050.614.955,00
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah SKPD taat perundang-undangan</i>	24 SKPD	48.691.157,00	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah SKPD taat perundang-undangan</i>	24 SKPD	48.691.157,00
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis				Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			
			<i>Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan</i>	24 Berkas	48.691.157,00		<i>Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan</i>	24 Berkas	48.691.157,00
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Arsip Statis yang Dikelola</i>	125 Dokumen	10.001.923.798,00	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Arsip Statis yang Dikelola</i>	125 Dokumen	10.001.923.798,00
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			
			<i>Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis</i>	20 Arsip	10.001.923.798,00		<i>Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis</i>	20 Arsip	10.001.923.798,00
2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	<i>Persentase LAKE Kabupaten/Kota</i>	89,29%	38.187.959,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	<i>Persentase LAKE Kabupaten/Kota</i>	89,29%	38.187.959,00
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	<i>Jumlah dokumen Penyusutan Arsip Inaktif</i>	80 Dokumen	38.187.959,00	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	<i>Jumlah dokumen Penyusutan Arsip Inaktif</i>	80 Dokumen	38.187.959,00
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun				Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun			
			<i>Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan</i>	4 Berkas	38.187.959,00		<i>Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan</i>	4 Berkas	38.187.959,00
	J U M L A H				14.396.053.967,00				14.396.053.967,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan didiskusikan dalam pembahasan Musrenbang RKPD. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Rencana kerja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di Kecamatan dan di Desa.

Pada Pra Musrenbang RKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran telah menentukan arah kebijakan yang akan di ambil. Kebijakan tersebut mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Kebijakan kebijakan ini merupakan prioritas untuk melaksanakan program kerja.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dilakukan berdasarkan Renstra Perpustakaan Nasional (Perpusnas) 2020-2025, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tujuan, Sasaran Perpusnas 2020-2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Peningkatan masyarakat pembelajar sepanjang hayat untuk mewujudkan masyarakat berbudaya literasi	Terwujudnya masyarakat berbudaya gemar membaca	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
			Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
		Terwujudnya layanan prima perpustakaan bagi masyarakat	Rasio kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat
			Nilai tingkat kepuasan pemustaka
2	Peningkatan pelestarian khasanah intelektual budaya bangsa untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri Indonesia	Terwujudnya perpustakaan sebagai pelestari khazanah budaya bangsa	Peningkatan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno
			Peningkatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Menjadi Koleksi Nasional
		Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk
			Ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk

Selanjutnya berdasarkan Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 2020-2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini, yaitu :

Tujuan, Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan ANRI 2020-2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh	Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan
		Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	Indeks Ketersediaan Arsip
		Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan
		Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI	Indeks Reformasi Birokrasi

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sebagai berikut;

- a. Meningkatkan kecerdasan masyarakat;
- b. Meningkatkan tata kelola sesuai standar baku kearsipan;
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan perpustakaan dan arsip secara permanen;
- d. Memudahkan akses layanan perpustakaan dan kearsipan;
- e. Mengembangkan kelembagaan dan SDM perpustakaan dan kearsipan.

Sasaran Renja Dispusipda tahun 2025 adalah:

- a. Meningkatnya angka kunjungan masyarakat ke perpustakaan;
- b. Memenuhi koleksi bahan perpustakaan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat;
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan perpustakaan;
- d. Meningkatnya preservasi koleksi bahan perpustakaan dan;
- e. Meningkatnya pemanfaatan bahan perpustakaan;
- f. Meningkatnya layanan perpustakaan;
- g. Meningkatnya pembinaan lembaga dan SDM perpustakaan;
- h. Meningkatnya kerjasama perpustakaan.

Sedangkan sasaran Program Pengembangan Kearsipan sebagai berikut;

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan arsip setiap pencipta arsip;

- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemeliharaan arsip;
- c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyimpanan arsip berdasarkan standar baku kearsipan;
- d. Meningkatnya preservasi arsip;
- e. Meningkatnya pemanfaatan arsip;
- f. Meningkatnya layanan kearsipan;
- g. Meningkatnya pembinaan lembaga dan SDM kearsipan;
- h. Meningkatnya kerjasama kearsipan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran

Dalam rangka mencapai sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran telah ditetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing;
- b. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima.

Dalam rangka mencapai tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran menetapkan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif;
- b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 mencakup 5 Program 19 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan, yang diuraikan sebagai berikut :

Berikut adalah Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran

**TABEL RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN PANGANDARAN**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				14.396.053.967,00			6.011.823.236,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.396.053.967,00			6.011.823.236,00
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				4.307.251.053,00			5.901.345.798,00
1,	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase peningkatan kompetensi aparatur		90% 93% 95%	3.246.053.967,00		92,25% 92,25% 97,5% 94%	5.088.456.325,00
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik		70%	2.278.774.137,00		75 %	3.742.957.843,00
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	15 Orang/bulan	2.278.774.137,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.742.957.843,00
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik		84%	63.429.360,00		85 %	111.551.068,00
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	30 Paket	2.706.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.959.736,00
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	35 Paket	44.942.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48.812.060,00
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	2 Paket	15.780.587,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		31.779.272,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan		80%	883.838.470,00		85 %	926.580.406,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	5 Laporan	229.800.070,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		348.824.587,00
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	204 Laporan	654.038.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		577.755.819,00
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi		80%	20.012.000,00		85 %	307.367.008,00
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	7 Unit	20.012.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		307.367.008,00
2,	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		19,95 Indeks	1.023.261.919,00		-	623.164.407,00
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aspek pembangunan literasi masyarakat		7 Aspek	916.276.600,00		7 Aspek	398.545.256,00
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan							
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	18 Perpustakaan	19.099.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		31.800.000,00
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	2 Perpustakaan	750.114.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		69.178.869,00
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota							
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	2 Layanan	25.318.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19.221.020,00
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota							
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	7 Perpustakaan	17.235.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		31.800.000,00
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	120 Orang	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan							
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	1 Dokumen	19.102.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		85.000.000,00
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan							
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		390 Eksemplar	21.348.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80.087.587,00
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota							
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	13 Eksemplar	21.326.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24.026.276,00
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik							
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	5 Perpustakaan	30.733.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45.431.504,00
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Budaya Gemar Membaca		15,77 Nilai	106.985.319,00		16,16 Nilai	224.619.151,00
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	130 Orang	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000,00
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial							
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	16 Perpustakaan	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12.000.000,00
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	1 Perpustakaan	19.865.909,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22.219.151,00
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca							
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	26 Orang	24.251.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80.000.000,00
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat							
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	65 Lokus	30.868.410,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90.400.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
3,	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan		10%	37.935.167,00		10%	189.725.066,00
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang didigitalisasi/Alih aksarakan		1 Dokumen	23.185.622,00		1 Dokumen	151.558.630,00
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno							
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	10 Orang	8.830.622,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		105.758.906,00
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan							
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	1 Eksemplar	14.355.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45.799.724,00
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan seleksi budaya etnis nusantara		2 Kegiatan	14.749.545,00		2 Kegiatan	38.166.436,00
	2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara							
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	1 Eksemplar	9.992.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		27.969.297,00
	2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara							
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	1 Eksemplar	4.757.545,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.197.139,00
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				10.088.802.914,00			110.477.438,00
1,	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai LAKE Kabupaten/Kota		(A) 3732 Nilai	10.050.614.955,00		(A) 3732	59.333.479,00
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD taat perundang-undangan		24 SKPD	48.691.157,00		24 SKPD	48.691.157,00
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis							
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	24 Berkas	48.691.157,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48.691.157,00
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Dikelola		125 Dokumen	10.001.923.798,00		150 Dokumen	10.642.322,00
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis							
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	20 Arsip	10.001.923.798,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.642.322,00
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN							
2,	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase LAKE Kabupaten/Kota		89,29 %	38.187.959,00		89,29%	51.143.959,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah dokumen Penyusutan Arsip Inaktif		80 Dokumen	38.187.959,00		90 Dokumen	51.143.959,00
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun							
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	4 Berkas	38.187.959,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		51.143.959,00
	J U M L A H					14.396.053.959,00			6.011.823.236,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Program Pembangunan Daerah adalah Strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan Kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program.

Rencana Program dan kegiatan prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 berisi Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran secara langsung, secara tidak langsung maupun sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Adapun rincian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki indikator: Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai Berikut:

- ❖ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- ❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

- ❖ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- ❖ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- ❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ❖ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- ❖ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Program ini memiliki indikator: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai Berikut:

- ❖ Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
 - Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
- Pengembangan Bahan Pustaka
- Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
- Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- ❖ Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
 - Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

Program ini memiliki indikator: Persentase Peningkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai Berikut:

- ❖ Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
- ❖ Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
 - Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

4. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Program ini memiliki indikator: Nilai LAKE Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai Berikut:

- ❖ Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
 - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
- ❖ Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI
 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
- ❖ Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:

- Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
- Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Program ini memiliki indikator: Persentase LAKE Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai Berikut:

- ❖ Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun, dengan Sub Kegiatan:
 - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
- ❖ Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
- ❖ Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, dengan Sub Kegiatan:
 - Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan
- ❖ Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran 2022-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Demikian rencana kerja ini diusulkan untuk dapat menjadi masukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.

Parigi, 17 Juli 2024

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PANGANDARAN



DODI DJUBARDI, S.Pd.
NIP. 19680404 199508 1 001